

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nurus Zaman, Politik Hukum Pengadaan Tanah: Antara Kepentingan Umum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika,2015.
- Desmadi Saharuddin, Pembayaran Ganti Rugi pada Asuransi Syariah. Edisi Pertama. Kencana: Prenadamedia Group, 2016.
- Mudakhir Iskandar Syah, Pembebasan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Upaya Hukum Masyarakat yang terkena Pembebasan dan Pencabutan Hak. Cet.3. Jakarta: Permata Aksara, 2015.

B. Jurnal

- Abdurrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Banyumedia Publishing, 2007.
- AP.Parlindungan, *Tanya jawab hukum agrarian dan pertanahan*, bandung: mandar maju, 2003.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian*, Jakarta: penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Edrian, *Masalah Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.
- Maria S.W. Smardjono, dikutip Yusriyadi, *Industrialisasi & perubahan Fungsi Sosial Hak Milik AtasTanah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2000.
- Mariah S.W. Sumarjono, *tanah dalam perspektif nak ekoomi*.
- Nia Kurniati,*Penyelesaian sengketa pertanahan bidang penanaman modal melalui arbitrase di Indonesia*, disertasi,program pasca sarjana universitas padjajaran, bandung: 2010.
- Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia (Ui-Press), 2015).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, ed. 1, cet. 17, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Soerjono Soekanto, *op. Cit.*

C. Karya Tulis Ilmiah (Skripsi, Thesis, dan Disertasi)

Mohammad, Paurindra Ekasetya. “Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis Pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa Di Kabupaten Brebes)”. Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015.

Purnawanti. “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Terhadap Pembangunan Fly Over Jombor Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

_____. *Undang-Undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. UU Nomor 2 Tahun 2012

_____. *Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015.

_____. *Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

_____. *Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Negara tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah*. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Negara Nomor 6 tahun 2015.

_____. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum*. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Cet. 2. Pustaka Buana, 2015.

E. Internet

1. [Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa](#) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”.
2. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>. Diakses pada Tanggal 16 juli 2018.
3. <https://abangdani.wordpress.com/2014/05/30/sejarah-lengkap-masjid-nabawi-penting/>. Diakses pada Tanggal 10 juli 2018.
4. <https://www.alkhoirot.net/2012/07/ijtihad-dalam-islam.html> diakses pada Tanggal 15 Juli 2018.
5. <https://id.wikipedia.org/wiki/Ijtihad> diakses pada Tanggal 23 Agustus 2018.
6. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5283c878ea908/langkah-hukum-bila-tak-sepakat-besaran-ganti-rugi-pembebasan-tanah> diakses pada tanggal 8 November 2018.

F. Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Putusan Nomor: 3451 K/Pdt/2017”.

Pengadilan Negeri Bekasi. “Putusan Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN Bks